



DPRD Kota Yogya Desak Regulasi Perlindungan Hukum dan Sosial untuk Korban Bencana

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogya mendesak sebuah regulasi yang mengatur soal perlindungan hukum dan sosial untuk korban kebencanaan. Desakan tersebut dilontarkan mengingat status siaga darurat bencana hidrometeorologi yang kemungkinan bakal disandang Kota Yogya hingga beberapa bulan ke depan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogya, Bambang Seno Baskoro mengatakan, Pemkot Yogya perlu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya selama status siaga darurat. Oleh sebab itu, pihaknya merekomendasikan adanya perlindungan hukum dan sosial bagi korban, beserta asetnya, maupun untuk relawan kebencanaan.

"Dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) memang belum diatur, makanya kami merekomendasikan agar itu bisa segera terlaksana," katanya, Jumat (24/1).

Berkaca pada kejadian pohon tumbang di Jalan Cendana yang mengakibatkan korban jiwa pada Selasa (21/1) lalu, ia memandang, masih ada tumpang tindih antar instansi. Oleh sebab itu, politikus Partai Golkar tersebut berharap realisasi sebuah regulasi yang mengatur soal santunan untuk korban jiwa dan lain sebagainya.

"Masih simpang siur. Nah, ini kami

sampaikan pada Bappeda dan BPKAD sebagai ruhnya, kita mendorong dan memastikan ada regulasi yang jelas," cetusnya.

Seno menegaskan, rekomendasi yang disampaikan legislatif pun tidak berhenti pada perlindungan sosial untuk korban bencana beserta asetnya semata. Namun, juga perlindungan hukum untuk para relawan kebencanaan yang selama ini senantiasa berjibaku memberikan bantuan di setiap insiden.

"Dalam melaksanakan kegiatan ke-relawatan itu harus ada dasar hukumnya. Selain perlindungan sosial, teman-teman relawan juga sangat memerlukan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Komisi C DPRD Kota Yogya juga melayangkan opsi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengasuransikan aset pohonnya. Seno meyakini, dengan total keseluruhan aset pohon di angka 20.488, alokasi yang dibutuhkan untuk asuransi tidak akan terlalu memberatkan APBD.

"Hanya sekitar Rp200 juta. Kalau dihitung dengan tingkat kerugian setiap tahun berapa untuk asuransi tidak terlalu membebani pemerintah daerah, ya kita asuransikan saja," cetusnya.

Antisipasi

Merrespons insiden pohon tumbang

beberapa waktu lalu, Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Rina Aryati Nugraha, mengaku sudah melakukan upaya antisipasi.

Menurutnya, intensitas pemangkasan pohon perindang yang berstatus milik DLH Kota Yogya, ditingkatkan guna meminimalisir insiden serupa. "Kami setiap hari melakukan pemangkasan, terutama yang kita prediksi membahayakan. Tapi, tetap menyesuaikan kemampuan peralatan dan tenaga yang ada," katanya, Jumat (24/1).

"Kalau tingginya di atas 9 meter, memang kita belum bisa menangani. Kemudian, yang terkena jaringan listrik, kita juga harus berkoordinasi dengan PLN," tambah Rina.

Di samping itu, sejak akhir 2024 silam, DLH Kota Yogya juga sudah menyiapkan petugas di luar jam kerja, yang secara khusus untuk penanganan pohon tumbang.

Sebagai informasi, pohon perindang yang tercatat sebagai aset DLH jumlahnya mencapai 20.488, yang tersebar di penjuru Kota Pelajar. "Mulai Desember 2024 kemarin, kita ada crew yang piket siang jam 14.00, sampai dengan jam 21.00 WIB, untuk antisipasi jika ada kejadian di luar jam kerja," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. BPKAD			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005